



LAPORAN AKTUALISASI

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2020 BERBASIS RISIKO AUDIT INSPEKTORAT DUA

Disusun Oleh:

Nama : Fitriyani Lestari, S.E.
NIP : 199204072019032002
Instansi : Setjen dan BK DPR RI

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum	9
BAB II.....	10
PROFIL ORGANISASI.....	10
A. Visi Misi Unit Kerja Esalon II	10
B. Struktur Organisasi	11
Tabel 1. Struktur Organisasi.....	11
C. Penjelasan Tugas dan Fungsi.....	12
BAB III.....	15
RANCANGAN AKUTUALISASI	15
A. Identifikasi Isu	15
B. Pemilihan Isu Prioritas	19
Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG.....	19
C. Gagasan Pemecahan Isu.....	19
D. Rancangan Aktualisasi.....	20
Tabel 3. Rencana Kegiatan Aktualisasi.....	21
BAB IV	32
PELAKSANAAN AKTUALISASI	32
A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi	32
Gambar 1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan	33
Gambar 2. Rapat Koordinasi Inspektorat II	35
Gambar 3. Analisis Peta Risiko	37
Gambar 4. Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan kepegawaian	39
Gambar 5. Aplikasi SIRUP	40

Gambar 6. Berkoordinasi dengan TU Inspektorat Utama dan Perencanaan & Keuangan	41
Gambar 7. Peringkat Peta Risiko	42
Gambar 8. Scoring Dokumen SPIP.....	43
Gambar 9. <i>Timetable/Schedule</i> dan Penyusunan Staff Audit	44
Gambar 10. Diskusi dengan Mentor dan para Auditor untuk menyusun Schedule Audit dan Pesonel Audit	44
Gambar 11. PKPT 2020 Berbasis Risiko Inspektorat II.....	45
Gambar 12. Melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko dengan Auditor Madya	47
Gambar 13. Sosialisasi hasil akhir PKPT 2020 Berbasis Risiko	48
E. Stakeholder.....	48
F. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala	48
G. Analisis Dampak	49
H. Jadwal Kegiatan.....	53
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	53
BAB V	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
LAMPIRAN	57
1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Kepada Pak Irtama	57
2. Surat Undangan Rapat Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	57
3. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	58
4. Laporan Singkat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	58
5. Foto Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko.....	59
6. Nota Dinas atau Surat Permohonan Permintaan Data	59

7.	Dokumentasi Proses Permintaan Data Kepada TU ITTAMA dan Bagian Perencanaan dan Keuangan	60
8.	Dokumentasi Permintaan Data melalui Email dengan Bagian Keuangan	
	60	
9.	Dokumentasi Output Berupa PKPT 2020 Berbasis Risiko	61
10.	Dokumentasi Kegiatan dengan Mentor dan Diskusi dengan Auditor Inspektorat II.....	61
11.	Kegiatan Reviu PKPT 2020 Berbasis Risiko oleh Atasan Langsung	62
12.	Kegiatan Sosialisasi Hasil Final PKPT 2020 Berbasis Risiko	62
13.	Surat undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi Hasil Aktualisasi	63
14.	Kegiatan Coaching	64
15.	Dokumentasi Kartu Kendali Bimbingan	64
16.	Dokumentasi Data Anggaran.....	66
17.	Dokumentasi Data TLHP	68
18.	Dokumentasi Data Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Aplikasi SIRUP	69



LEMBAR PERSETUJUAN AKTUALISASI

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2020 BERBASIS RISIKO AUDIT INSPEKTORAT DUA

Disusun Oleh:

Nama : Fitriyani Lestari,S.E.
NIP : 199204072019032002
Instansi : Setjend dan BK DPR RI

Peserta Diklat,

Fitriyani Lestari, S.E.,
NIP.199204072019032002

Menyetujui

Mentor,

Margaretha Susanti, S.E.
NIP.198203102003122002

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
NIP.196804011998032003
Coach,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT,

Penyusunan laporan yang berjudul "Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Yang Berbasis Risiko Audit" ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M. selaku Inspektur Utama
2. Ibu Margaretha Susanti, S.E., selaku mentor
3. Ibu Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. selaku coach
4. Seluruh Senior dan Rekan Sejawat yang ada di Inspektorat II yang telah mendukung pembuatan rancangan aktualisasi.

Dalam penyusunannya Rancangan aktualisasi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidak sempurnaan, dikarenakan keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran sangat membantu dalam memperbaiki dan penyempurnaan rancangan aktualisasi ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya.

Bogor, 10 Oktober 2019

Penulis

Fitriyani Lestari, S.E.

NIP: 199204072019032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PNS memiliki peranan untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan.

Untuk mewujudkan karakter PNS yang kuat dan professional diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.

Berdasarkan hal tersebut PNS dituntut untuk dapat membuat proyek aktualisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Dalam hal ini penulis yang saat ini sedang menempati jabatan CPNS di Inspektorat II sebagai Auditor Ahli Pertama berinisiatif untuk melakukan inovasi pada unit kerja terkait demi menciptakan peningkatan kualitas kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintahan menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas APIP dengan IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 pada tahun 2019 harus direspon positif dan dijadikan momentum untuk meningkatkan kapasitas SDM Auditor dan melengkapi instrumen regulasi yang menjadi prasyarat peningkatan level IACM tersebut.

Berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI per tanggal 22 Desember 2017, diketahui bahwa, capaian kapabilitas APIP hasil penilaian mandiri pada tahun 2017 adalah masih di level 2. Oleh karena itu untuk mencapai Inspektorat level 3, salah satu rencana tindak (*Action Plan*) yang diperlukan untuk memenuhi Infrastruktur level 3 adalah dengan cara menyusun peta audit berbasis risiko dan menyempurnakan PKPT berbasis Prioritas Management menjadi PKPT Berbasis Risiko.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar runtuk menilai/ mengevaluasi kinerja Pejabat Fungsional Auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Aparat pengawasan intern harus menyusun perencanaan tahunan sebelum melaksanakan tugas-tugasnya. Perencanaan tahunan disusun berbasis risiko untuk

menentukan prioritas kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area-area organisasi yang memiliki paparan risiko terbesar. Untuk itu, Inspektor harus memahami proses tujuan organisasi dan proses manajemen risiko organisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. Visi Misi Unit Kerja Esalon II

a. VISI :

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, Akuntabel, dan Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

b. MISI :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional dan Kompeten.

B. Struktur Organisasi

Tabel 1. Struktur Organisasi



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung telah diatur keberadaanya dalam Pasal 294 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang Administrasi dan Persidangan dan dalam melaksanakan wewenang tugasnya Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki susunan organisasi, diantaranya yaitu Inspektor Utama.

C. Penjelasan Tugas dan Fungsi

Dalam pasal 257 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI disebutkan bahwa "Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Badan Keahlian DPR RI dan Deputi Bidang Persidangan".

Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 257, Inspektorat UU menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat II;
- e. Perumusan kebijakan pengawasan;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- g. Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- h. Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- i. Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- j. Pendekripsi dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- k. Pelaksanaan peran serta kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kejahatan keuangan;

- I. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- m. Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- n. Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
- o. Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- p. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- q. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- r. Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- s. Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- t. Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- u. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
- v. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;

- w. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat II.
3. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Aparat Inspektorat II.

Sasaran Strategis dari Inspektorat II berujung kepada meningkatnya kualitas dan kuantitas dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian intern Inspektorat II terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan yang transparan dan akuntabel.

1. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II melalui kerja sama dengan pihak eksternal;
2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat II dalam mewujudkan Good Government atas kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan;
3. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat II.

BAB III

RANCANGAN AKUTUALISASI

A. Identifikasi Isu

a. Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko

Masalah :

Penentuan PKPT Inspektorat II masih belum terstruktur dan tepat sasaran. APIP masih cenderung mengagendakan auditnya secara manual, yakni hanya melaksanakan audit berdasarkan professional judgement atas suatu assersi management yang akan diverifikasi, atau berdasarkan kejadian dan peristiwa.

Penyebab :

Auditor internal Inspektorat II saat ini memang belum memiliki PKPT yang berbasis risiko, hal tersebut disebabkan karena Inspektorat II saat ini juga belum memiliki risk register atau dasar risiko yang digunakan dalam penyusunan PKPT tahun 2019. Pada prakteknya di lapangan Inspektorat II masih melakukan auditnya secara tradisional, melakukan perencanaan audit berdasarkan professional judgement yang berorientasi pada perolehan temuan yang mengarah pada penyimpangan prosedur yang cenderung dipandang oleh auditi sebagai mencari-cari kesalahan auditi tanpa memberikan nilai tambah bagi perbaikan kinerja auditi.

Kondisi yang Harapkan :

Penentuan risiko bisa dilihat dari berbagai pendekatan seperti besarnya anggaran, tahun terakhir dilakukannya audit, dan analisis beban kerja. Esensi penyusunan PKPT berbasis resiko inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemeriksa untuk melakukan audit berbasis risiko

Dampak :

Dampak dengan tidak adanya PKPT berbasis risiko adalah lemahnya pengendalian manajemen yang mana tidak dapat melakukan identifikasi risiko-risiko utama dalam unit kerja yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Selain itu juga menimbulkan adanya pemetaan ruang lingkup Audit yang tidak tepat sasaran. Perencanaan program kerja audit (PKPT) yang tidak didasari oleh sistem yang terstruktur akan berakibat terjadinya kegiatan penugasan audit tidak efektif dan efisien.

- b. Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman pembuatan Kertas Kerja Audit**

Masalah :

Dalam pelaksanaan kegiatan audit selama ini masih hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Irtama sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Inspektur Utama Nomor: IU/01/SETJEN DAN BK DPR_RI/IRTAMA/XI/2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, tetapi itu hanya mencakup garis besar kegiatan pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pembuatan Kertas Kerja Audit di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Penyebab :

Berdasarkan latar belakang diatas, tidak adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pembuatan Kertas Kerja Audit di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masing-masing auditor akan pentingnya prosedur Teknis Pelaksanaan audit yang dilakukan secara terstruktur dan dokumentasi hasil audit berupa Kertas Kerja Audit.

Kondisi yang Harapkan :

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan format KKA berfungsi sebagai alat untuk membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Melalui penyusunan KKA, auditor dapat mendokumentasikan proses dan hasil audit. Dokumentasi ini akan digunakan sebagai pendukung opini yang diberikan oleh auditor.

Dampak :

Dengan tidak adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan KKA yang tersusun dengan baik, maka segala bentuk eviden yang merupakan supporting dari penentuan OPINI audit tidak dapat dibuktikan secara efektif, hal tersebut disebabkan karena KKA tersebut tidak dapat dimengerti oleh pembaca dengan baik.

- c. Belum terdapat aplikasi yang melakukan monitoring perhitungan DUPAK dalam pengembangan profesi audit

Masalah :

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Saat ini belum terdapat aplikasi

yang dapat membantu auditor dalam melakukan perhitungan nilai DUPAK secara komputerisasi, baik dalam melakukan perhitungan angka kredit secara otomatis maupun aplikasi yang dapat melakukan remainder berupa notifikasi terkait target dan pemenuhan nilai DUPAK bagi seorang auditor.

Penyebab :

Saat ini penilaian angka kredit (DUPAK) masih dilakukan secara manual dan memang belum dilakukan secara digitalisasi atas database DUPAK tersebut.

Kondisi yang Harapkan:

Dengan adanya pengisian dan monitoring DUPAK secara komputerisasi akan memudahkan para pegawai dalam melakukan input dan perhitungan angka kredit. Lebih lanjut penginputan DUPAK secara sistem juga sebagai bentuk monitoring apabila angka kredit tidak mencapai target.

Dampak :

Perhitungan DUPAK secara manual akan menimbulkan adanya risiko human error atau salah perhitungan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

B. Pemilihan Isu Prioritas

Teknik Analisis (USG)

Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG

No.	Isu	Kriteria			Total	Rangking
		U	S	G		
1.	Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko	4	5	5	14	1
2.	Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman pembuatan Kertas Kerja Audit.	3	4	4	11	2
3.	Belum terdapat aplikasi yang melakukan monitoring perhitungan DUPAK dalam pengembangan profesi audit	3	3	4	10	3

Keterangan:

U= Urgency (Penting)

S = Seriousness (Keseriusan)

G = Growth

Range

Skor 5 = Sangat Besar

Skor 4 = Besar

Skor 3 = Cukup

Skor 2 = Kecil

Skor 1 = Sangat Kecil

Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah: isu nomor 1,yaitu Belum adanya PKPT berbasis Risiko pada area Inspektorat II.

C. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan pemecahan isu melalui Teknik USG, maka didapat isu nomor 1, yaitu belum adanya PKPT tahunan berbasis Risiko. Oleh karena itu dibutuhkan pemecahan solusi melalui pemikiran saya Bersama dengan coach, dan mentor melalui gagasan berjudul "Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2020 Pada Area Pengawasan Inspektorat II"

D. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Inspektorat II

Identifikasi Isu : 1. Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko
2. Inspektorat II belum memiliki Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit dan pedoman pembuatan Kertas Kerja Audit
3. Belum terdapat aplikasi yang melakukan monitoring perhitungan DUPAK dalam pengembangan profesi audit

Isu yang Diangkat : Inspektorat II belum memiliki PKPT berbasis Risiko

Gagasan Pemecahan Isu : Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2020
Pada Area Pengawasan Inspektorat II

Tabel 3. Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Rapat dengan Internal Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Penjadwalan waktu rapat ke bagian TU - Pelaksanaan rapat - Pembuatan laporan singkat hasil rapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal rapat yang telah disetujui - Daftar hadir kegiatan rapat - Laporan singkat hasil rapat 	Nilai Dasar PNS: 1. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan Inspektorat II	Melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan unit kerja terkait, demi kelancaran aktualisasi PKPT 2020 berbasis risiko yang akan membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dan prosedur audit yang tepat sasaran,	1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan musyawarah 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam memecahkan suatu masalah 3. Profesional Segala bentuk keputusan yang diambil berdasar

			<p>2. Akuntabilitas ditunjukan dengan adanya pertanggung jawaban materi rapat dan laporan singkat hasil rapat yang telah dilakukan.</p> <p>3. Komitmen Mutu Kemauan keras dari adanya kesadaran untuk melakukan perubahan di lingkungan kerja</p>	<p>akuntabel dan berkualitas.</p>	<p>pada keahlian</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dalam rapat</p>
--	--	--	---	-----------------------------------	--

				<p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan berbagai pihak seperti bagian TU, para auditor dan atasan langsung</p>		
2	Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko	- Meminta data jumlah seluruh pegawai yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian beserta Analisis Beban	- Data0020penunjang terkait penyusunan PKPT berbasis risiko	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <p>1. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan</p>	<p>Pengumpulan dan analisis data terkait penentuan tingkat risiko dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko akan meningkatkan kualitas dalam melakukan</p>	<p>1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan pengumpulan data terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko</p> <p>2. Akuntabel Melaksanakan prinsip</p>

		<p>Kinerjanya (ABK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminta data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan terkait pencapaian realisasi anggaran semua unit yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian - Koordinasi dengan bagian Tata Usaha Inspektorat Utama terkait data tindak lanjut hasil 	<p>n etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan stakeholder terkait.</p> <p>2. Akuntabilitas Kejelasan tujuan dalam permintaan data kepada unit lain</p> <p>3. Komitmen Mutu Efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan data penunjang sebagai bahan penyusunan PKPT</p>	<p>perencanaan audit dan prosedur audit sebagai dasar atau landasan kegiatan audit yang efektif dan efisien.</p> <p>3. Profesional Pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi dan koordinasi secara profesional berdasarkan prosedur yang berlaku,</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap data yang sudah</p>	keterbukaan dalam pengumpulan data terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko
--	--	---	--	--	---

		<p>temuan BPK</p> <p>- Koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan terkait data pengadaan barang dan jasa atas periode yang akan di audit.</p>		<p>berbasis Risiko</p> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan unit lain.</p>		diberikan oleh pihak lain
--	--	---	--	---	--	---------------------------

3	Membuat peta risiko dan PKPT 2020 berbasis risiko beserta kelengkapan pendukung.	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan data sesuai jenis dan periode - Pengolahan data di dalam Microsoft Excel - Melakukan penetapan peta risiko berdasarkan hasil pengolahan data - Membuat PKPT 2020 berbasis risiko berdasarkan hasil peta risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - PKPT 2020 berbasis risiko yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan pengawasan tahunan - Data risiko yang tersusun rapi 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Bertanggung jawab memenuhi pertanggung jawaban sebagai bukti hasil pelaksanaan Latihan Dasar. 2. Etika Publik Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak lain dalam proses pelaksanaan 3. Komitmen mutu Menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu pada penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko 	<p>Penataan dan pengelolaan data secara tepat dan benar akan memudahkan dalam menentukan peta risiko yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penentuan PKPT berbasis risiko</p> <p>1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan membuat peta risiko</p> <p>2. Akuntabel Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dengan menggunakan perhitungan dan analisa peta risiko secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya</p> <p>3. Profesional Penyusunan peta risiko yang berdasar pada</p>

				<p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i></p> <p>Kolaborasi antar unit dalam membuat suatu inovasi yang baru</p> <p>Pelayanan Publik</p> <p>Diharapkan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko tersebut dapat meningkatkan standar dan mutu pengawasan, sehingga akuntabilitas kinera Setjen dan BK DPR RI dapat dipertangungjawabkan secara terbuka kepada public</p>		<p>masukan dari para ahli</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko.</p>
--	--	--	--	---	--	---

4	Melakukan review PKPT 2020 berbasis Risiko beserta kelengkapan pendukungnya oleh atasan langsung.	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta pegawai Inspektorat II untuk melakukan review atas hasil pemetaan peta risiko ke dalam PKPT 2020 berbasis risiko - Meminta pegawai Inspektorat II untuk mencari risiko sebagai bekal pengawasan dari audit yang akan diawasinya - Menganalisis hasil review 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan review PKPT 2020 berbasis risiko - Kemudahan dan kesulitan dalam memahami PKPT 2020 berbasis risiko. - Form evaluasi yang dilakukan oleh atasan langsung - Masukan dari atasan lansung Terkait hasil review 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Bertanggung jawab terhadap hasil, serta meminta feedback untuk penyempurnaan hasil. 2. Etika publik Berkommunikasi dengan baik ketika meminta feedback pendapat terkait dengan produk yang sudah kita hasilkan. 3. Komitmen mutu (Melakukan audit tepat sasaran dengan Audit berbasis risiko demi tercapainya suatu hasil audit yang efektif, efisien dan terjaga kualitas mutunya). 	<p>Hasil review yang dilakukan atas PKPT berbasis risiko akan meningkatkan kualitas hasil audit dan rekomendasi audit sesuai dengan tingkatan risiko dan beban kerja yang dihadapi oleh unit kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan review PKPT Audit berbasis risiko 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam melaksanakan review PKPT berbasis risiko 3. Profesional Meminta masukan dari para ahli terkait penyusunan PKPT

				<p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i></p> <p>Kolaborasi dalam hal penyempurnaan PKPT berbasis risiko</p> <p>Pelayanan Publik</p> <p>Mengukur seberapa besar manfaat dari suatu implementasi atas PKPT 2020 berbasis risiko dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penugasan audit..</p>		<p>berbasis risiko</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan review PKPT berbasis risiko</p>
5	Melaporkan hasil akhir kegiatan	- Pembuatan laporan - Sosialisasi materi PKPT 2020 berbasis risiko di lingkungan Inspektorat II	- Laporan hasil kegiatan - Pemanfaatan PKPT 2020 berbasis risiko di lingkungan	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <p>1. Akuntabilitas (transparansi, tanggung jawab) 2. Nasionalisme (kepentingan bersama) 3. Etika publik (berkomunikasi dengan baik)</p>	Hasil akhir kegiatan diharapkan akan membantu auditor mempermudah dalam penentuan pemetaan	<p>1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan</p>

	- Laporan singkat hasil sosialisasi akhir	Inspektorat II	<p>4. Komitmen mutu (efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu)</p> <p>5. Anti Korupsi (disiplin, berani, jujur)</p> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i></p> <p>Koordinasi antar unit dalam penyempurnaan hasil</p>	<p>unit kerja yang akan diaudit berdasarkan landasan yang jelas.</p>	<p>2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan</p> <p>3. Profesional Melaksanakan pelaporan hasil rancangan aktualisasi dengan meminta masukan dari para rekan auditor yang ahli di bidangnya</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran</p>
--	---	----------------	---	--	--

						dan tanggung jawab dalam penyusun perencanaan audit yang dituangkan dalam PKPT 2020 berbasis risiko
--	--	--	--	--	--	---

BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

Pengendalian Intern yang kuat merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola kepemerintahan yang baik. Pengendalian internal yang kuat akan membantu instansi pemerintah mencapai tujuannya melalui manajemen risiko yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern tersebut diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. APIP diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketataan, kehematan, efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah. APIP juga diharapkan memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Aparat pengawasan intern harus menyusun perencanaan tahunan sebelum melaksanakan tugas – tugasnya. Perencanaan tahunan disusun berbasis risiko untuk menentukan prioritas kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area – area organisasi yang memiliki paparan risiko terbesar. Oleh karena itu dalam hal tersebut Inspektorat II mulai menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2020 berbasis risiko. Berikut merupakan beberapa kegiatan yang telah CPNS lakukan demi memenuhi pelaksanaan aktualisasi Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko di area Inspektorat II.

Kegiatan 1 : Rapat dengan Internal Inspektorat II

Langkah pertama yang dilaksanakan oleh penulis setelah melaksanakan sidang akhir rancangan di Wisma Giry Sabha Kopo adalah mengkomunikasikan dan melaksanakan presentasi singkat dengan Plt. Inspektor II yaitu Bpk. Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Hal ini dilakukan agar pimpinan mengetahui baik secara garis besar ataupun secara teknis yang akan penulis lakukan selama 30 hari habituasi di unit Inspektorat II.

Penulis berencana untuk mengaktualisasikan hasil rancangan penulis yang berjudul "Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 Berbasis Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II" dimana hal tersebut merupakan hasil pemilihan dari 3 isu yang dianggap *urgent* oleh penulis yang berada di dalam unit Inspektorat II itu sendiri,

Penulis telah berkordinasi dan melaksanakan konsultasi terhadap mentor terkait pemilihan isu tersebut. Untuk lebih menunjang fleksibilitas dalam pelaksanaan habituasi sebagai dasar koordinasi dengan instansi lain, maka penulis pun membuat Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi yang ditandatangani oleh Bpk Plt. Inspektor II yaitu Bpk. Drs. Setyanta Nugraha, M.M.

Gambar 1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan



Langkah kedua dalam pelaksanaan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko adalah dengan mengadakan rapat internal dengan jajaran Inspektorat II yang terdiri dari para auditor madya, utama, dan pertama serta CPNS yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat II Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, rapat internal dilakukan untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II. Beberapa informasi yang diperoleh dan dapat dipertimbangkan dari rapat internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan PKPT Audit 2020 berbasis risiko Inspektorat II meliputi perencanaan klien pada kegiatan audit kinerja dan audit pengadaan barang dan jasa yang memiliki tingkat risiko yang tinggi berdasarkan jumlah anggaran, sumber daya manusia, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP dan nilai pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019.
2. Penyusunan PKPT Audit 2020 berbasis risiko Inspektorat II meliputi penyusunan personel audit dan jadwal pelaksanaan penugasan audit.
3. Penentuan klien dalam audit pengadaan barang dan jasa berdasarkan data yang di peroleh bagian Perencanaan melalui Aplikasi SIRUP.
4. Penentuan personel audit yang akan melakukan penugasan yaitu berdasarkan hasil perhitungan angka kredit yang di peroleh dari bagian TU Inspektorat Utama.
5. Penyusunan personel audit akan dibuat lebih efektif dan efisien yaitu terdiri dari 1 orang ketua tim, dan 2 orang anggota. Kemudian 1 orang pengendali teknis akan

menangani 3 tim audit dalam 3 penugasan audit yang berbeda.

6. Porsi tugas dimasing-masing jabatan akan dibuat sesuai dengan tingkatan dari tanggung jawab masing-masing auditor.

Gambar 2. Rapat Koordinasi Inspektorat II



Tantangan utama yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan klien yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. Adanya keterbatasan ini menyebabkan APIP harus menetapkan alokasi sumber daya dengan memfokuskan audit pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Audit intern berbasis risiko merupakan sebuah metodologi yang menghubungkan auditor internal dengan kerangka manajemen risiko keseluruhan organisasi pemerintahan.

Perencanaan audit intern berbasis risiko didasarkan pada tujuan organisasi birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan audit yang memberikan keyakinan bahwa, melalui pengendalian intern, seluruh risiko yang mengancam tujuan instansi/lembaga pemerintah telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima sehingga tujuan dapat tercapai. Perencanaan audit intern

berbasis risiko memungkinkan APIP untuk memberikan jaminan atau asurans kepada pimpinan instansi/lembaga pemerintah bahwa proses manajemen risiko telah menghasilkan tata kelola risiko yang efektif dan telah mempertimbangkan selera risiko yang ditetapkan. Perencanaan audit intern berbasis risiko merupakan perluasan dan penyempurnaan dari sistem audit tradisional yang lebih menekankan audit pada pengendalian inten semata dan melaporkan kecukupan dan efektivitas dari pengendalian intern saja. Untuk itu dibutuhkan suatu peta risiko dari sudut pandang auditor sebagai langkah awal untuk mencapai audit intern berbasis risiko.

Konsep PKPT 2020 Berbasis Risiko pada area pengawasan inspektorat II merupakan bentuk dari pembaharuan (inovasi) agar perencanaan audit intern ke depannya berbasis kepada risiko sehingga menghasilkan suatu kegiatan audit yang efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan suatu peningkatan komitmen mutu di unit Inspektorat II demi terwujudnya kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam kegiatan rapat internal ini pun nasionalisme juga tercermin bahwa konsolidasi ini dilakukan secara penuh nuansa kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam rangka mencapai kesepakatan terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dan penentuan kriteria-kriteria yang akan diintegrasikan dalam penyusunan PKPT tersebut. Dalam pelaksanaan rapat pun tata krama, sopan santun, komunikasi dan etika dalam menyampaikan pendapat yang baik dimplementasikan sebagai wujud internalisasi dari nilai etika publik di dalamnya.

Gambar 3. Analisis Peta Risiko

PETA RISIKO 2019
Inspektorat B

No.	KODE RISIKO	GARIS RISIKO	BESARAN RISIKO			DAMPAK RISIKO			SIMPATI			Total Simpati	RISIKO	ANALOGI RISIKO DAN JAWABAN	
			TOTAL		LAMAR	JENIS RISIKO		DAMPAK PERINDUSTRIAN		DAMPAK PEMERINTAH		LAMAR			
			URANG	LENGKAP	URANG	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP		
1	1741	Risiko Pengaruh	471.174.015.000	Di atas 100 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
2	1742	Risiko Penyebaran R.	148.220.000.000	Di atas 100 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
3	1743	Risiko Kehilangan Aset Pemerintah	48.270.012.000	1-10 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
4	1744	Risiko Kehilangan Aset Perusahaan	114.879.002.000	1-10 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
5	1745	Risiko Pembatasan Pemerintah	181.312.001.000	1-10 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
6	1746	Risiko Pengaruh	1.000.000.000	1-10 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
7	1747	Risiko Pengaruh Pihak Luar Pemerintah dan Perusahaan	13.781.000.000	1-10 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
8	1748	Risiko Pengaruh Negara	0,724.837.000	Di bawah 10 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
9	1749	Risiko Kehilangan Aset/Barang Negara	0,010.000.000	Di bawah 10 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
10	1750	Risiko Politik	14.910.271.000	Di atas 100 Miliar	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0

LEGENDA ANALOGI RISIKO DAN JAWABAN

No.	KODE RISIKO	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP	URANG	LENGKAP
1	Anggaran Yang Didukung	01 hingga 10 Miliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Degradasi	0-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bantuan Tidak (Tidak Lengkap Hasil Penerbitan) BTP	010% atau lebih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pengalihan Barang dari Jadi	01 hingga 10 Juta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kegiatan 2 : Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko

Dalam pengumpulan data penunjang, penulis melakukan pendekatan kepada auditor senior terlebih dahulu untuk mengetahui analisis data apa saja yang diperlukan dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko. Auditor Inspektorat II sebelumnya telah melakukan analisis data penunjang terkait penyusunan peta risiko dalam memenuhi penilaian IACM Inspektorat II menuju level 3. Data yang telah dianalisis sebelumnya adalah Laporan Anggaran dan Realisasi yang dikelola oleh 10 Biro di bawah area pengawasan Inspektorat II tahun 2017 – 2019 pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Kehlian beserta jajaran di bawahnya, yang diperoleh dari bagian Perencanaan, Analisis Beban Kinerja (ABK) tahun anggaran 2017-2019 dari bagian kepegawaian, serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK di 10 Biro dari area pengawasan Inspektorat II. Dari hasil analisis tersebut, telah dilakukan penyusunan peta risiko dan pembuatan tingkat risiko audit dari 10 Biro dari area pengawasan Inspektorat II yang telah dilakukan pada bulan Juli 2019. Analisis Peta Risiko tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 3.

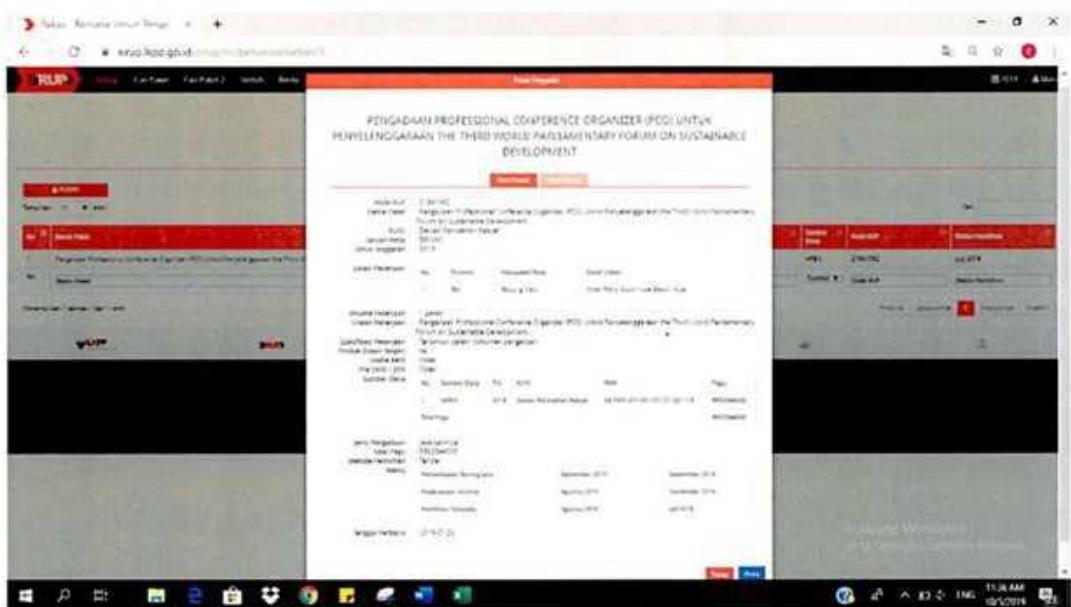
Manfaat dari penyusunan aplikasi peta risiko adalah untuk memudahkan Inspektorat II dalam mengidentifikasi risiko dari setiap audit yang berfungsi sebagai *Early Warning* dalam melakukan pengawasan yang menjadi landasan bagi Inspektorat II dalam menjalankan audit yang berbasis risiko, serta memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan audit dalam menentukan ruang lingkup kegiatan audit dan pengawasan.



Gambar 4: Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan Keuangan dan kepegawaian

Dalam melakukan peningkatan kualitas mutu dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis melakukan penambahan komponen analisis ke dalam peta risiko yang ditelah dibuat sebelumnya. Penulis melakukan tambahan analisis terkait Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa, mengingat kegiatan Audit di Insektorat II selain Audit Kinerja juga terdapat Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa.

Penulis kemudian melakukan koordinasi kembali dengan bagian Perencanaan dan Keuangan untuk memperoleh data anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Kehlian yang merupakan area pengawasan Inspektorat II. Hasil dari Koordinasi tersebut adalah data Anggaran Pengadaan Barang dan Jada dapat dilihat pada Aplikasi SIRUP (<https://sirup.lkpp.go.id>).



Gambar 5. Aplikasi SIRUP

Dalam penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis juga melakukan koordinasi dengan bagian Tata Usaha Inspektorat Utama untuk memperoleh data kepegawaian auditor yang terdiri dari data perhitungan angka kredit terupdate yaitu per semester II 2018, database kompetensi auditor yaitu yang berisi informasi diklat auditor dan rincian *Risk Register* atau dokumen SPIP (Sistem Pengendalian Internal). Data tersebut digunakan dalam penyusunan personel tim audit agar sesuai dengan susunan jabatan dan porsi kerja yang seharusnya, sedangkan untuk *Risk Register* digunakan untuk menentukan ruang lingkup audit berdasarkan hasil penilaian pengendalian internal yang telah dilakukan oleh setiap unit kerja.

Pada tahapan ini penulis melakukan koordinasi dengan unit lain, khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Tata Usaha Inspektorat Utama. Komunikasi dijalin dengan rasa sopan santun, dan sesuai dengan prosedur birokrasi yang ada sebagai internalisasi dari nilai etika publik yang ada di dalamnya. Biro Perencanaan dan Tata Usaha Inspektorat Utama juga

menunjukkan sikap yang kooperatif dan sangat mendukung atas kegiatan aktualisasi ini, sikap saling mendukung dan kooperatif juga menunjukkan tingkat integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja. koordinasi dengan bagian Perencanaan dan Tata Usaha Inspektorat Utama serta bimbingan dengan coach Ibu Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. merupakan penerapan nilai *whole of government* (WoG) sebagai hubungan lintas sektor Bidang untuk menciptakan sistem pengawasan internal pada area pengawasan Inspektorat II

Manfaat dari pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko ini adalah sebagai bahan input pengolahan data, dimana data-data yang valid tersebut dapat merepresentasikan hasil dari pemetaan risiko dari sudut pandang auditor, agar tercapai kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, hal tersebut sebagai implementasi dari nilai komitmen mutu dan juga akuntabilitas



Gambar 6. Berkoordinasi dengan TU Inspektorat Utama dan Perencanaan & Keuangan

Kegiatan 3 : Membuat peta risiko dan PKPT 2020 berbasis risiko beserta kelengkapan pendukung.

Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel*. Penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko dilakukan setelah penentuan peringkat risiko yang terdapat pada peta risiko yang telah dilakukan analisis sebelumnya pada gambar 3. Hasil pemeringkatan pada peta risiko kemudian dipilih dari 4 peringkat merupakan unit kerja yang memiliki tingkat risiko yang tinggi di tahun 2019. Sedangkan untuk audit pengadaan barang dan jasa, unit kerja yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa dengan nilai yang tinggi merupakan unit yang memiliki kemungkinan adanya nilai risiko yang tinggi.

Gambar 7. Peringkat Peta Risiko

No	KODE UNIT	UNIT / BIRO	AUDIT KINERJA		AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA			RISIKO
			Total Bobot	Risiko	TOTAL	URAIAN	BOBOT	
1	5781	Biro Persidangan I	8	2	-	-	-	-
2	5782	Biro Persidangan II	6	3	-	-	-	-
3	5783	Biro Kerjasama Antara Parlemen	5	5	9,953,348,000 - Di bawah 10 Milyar	-	1	2
4	5784	Biro Kesekretariatan Pimpinan	6	3	-	-	-	-
5	5785	Biro Pemberitaan Parlemen	9	1	46,133,450,000 10-50 Milyar	-	2	1
6	5796	Pusat Penyebarluasan UU	4	6	-	-	-	-
7	5797	Pusat Penjaminan Pelaksanaan Pelaksanaan UU	4	6	-	-	-	-
8	5798	Pusat Kajian Anggaran	3	9	-	-	-	-
9	5799	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3	9	-	-	-	-
10	5800	Pusat Penelitian	4	6	-	-	-	-

Setelah menentukan unit dan biro yang akan diaudit kemudian penulis menentukan audit yang akan diaudit dengan menggunakan *Risk Score* yang berasal dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Dokumen SPIP). Dari hasil scoring tersebut, kemudian penulis memilih audit yang memiliki score paling tinggi untuk dimasukkan ke dalam PKPT 2020 berbasis risiko.

Gambar 8. Scoring Dokumen SPIP

Rincian Dokumen Identifikasi Risiko

Periode 2018

NO	KODE UP	UNIT / BIRO	Auditee	Risk Score
1	5781	Biro Persidangan I	Bagian Sekretariat Komisi I Bagian Sekretariat Komisi II Bagian Sekretariat Komisi III Bagian Sekretariat Komisi IV Bagian Sekretariat Komisi VI Bagian Sekretariat Komisi VII Bagian Sekretariat Komisi VIII Bagian Sekretariat Komisi IX Bagian Sekretariat Komisi X Bagian Sekretariat Komisi XI Bagian Persidangan Paripurna	
				9
				10
2	5782	Biro Persidangan II	Bagian Sekretariat Badan Legislatif Bagian Sekretariat Badan Anggaran Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga Bagian Sekretariat Panitia Khusus	8
				16
3	5783	Biro Kerjasama Antar Parlemen	Bagian Sekretariat Kerja sama Organisasi Internasional Bagian Sekretariat Kerja sama Organisasi Regional Bagian Sekretariat Kerja sama Bilateral Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	2
4	5784	Biro Kesekretariatan Pimpinan	Bagian Sekretariat Ketua Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	12
5	5785	Biro Pemberitaan Parlemen	Bagian Media Cetak dan Media Sosial Bagian Hubungan Masyarakat Bagian Televisi dan Radio Parlemen Bagian Penerbitan	25
				20
				8
				-
6	5796	Pusat Perancangan UU		7
7	5797	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan UU		7
8	5798	Pusat Kajian Anggaran		15
9	5799	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara		
10	5800	Pusat Penelitian		

Tahap selanjutnya, setelah penulis menentukan audit atau klien yang akan diaudit, kemudian penulis membuat *timetable* atau *Schedule* kegiatan audit, serta penentuan personel audit yang terdiri dari Pengendali Teknis yang merupakan Auditor Madya, Ketua Tim yang merupakan minimal Auditor Muda,

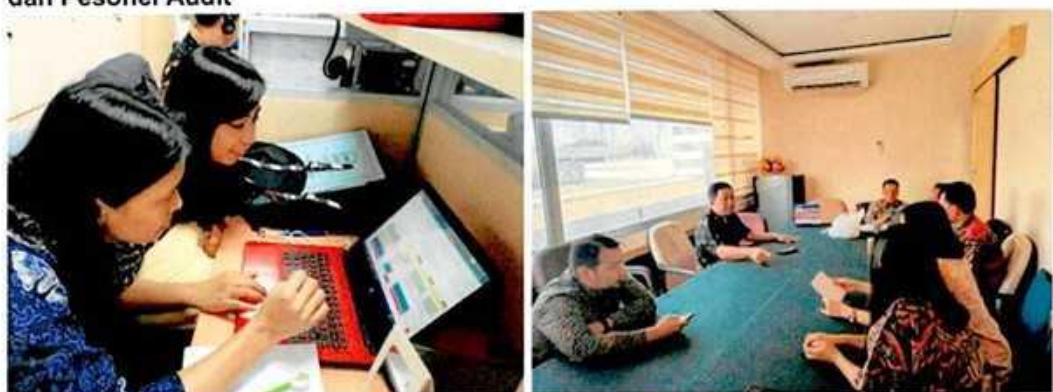
dan Anggota yang terdiri dari 3 orang yang merupakan Auditor Pertama maupun Auditor Terampil. Dalam pembuatan jadwal dan penentuan personel audit, Penulis melakukan koordinasi kembali dengan seluruh Auditor Inspektorat II agar dapat memberikan pendapat mengenai penjadwalan dan personel audit.

Gambar 9. Timetable/Schedule dan Penyusunan Staff Audit

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (P.K.P.T.)
INSPEKTORAT II SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kegiatan Uraian, Tambahan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III
A.	AUDIT													
	Buden													
	Dani W													
	Nurharqin													
	Hariyah													
	Rani													
	Santi													
	Fauzi													
	Titi													
	Panti													
	Wati													

Gambar 10. Diskusi dengan Mentor dan para Auditor untuk menyusun Schedule Audit dan Pesonel Audit



Tahap selanjutnya, penulis kemudian melakukan konsep penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko secara keseluruhan, berdasarkan masukkan dan pendapat yang telah diterima dari para auditor di Inspektorat II. Informasi lebih lanjut dari hasil diskusi yang telah dilakukan tersebut, penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko yang telah dibuat saat ini merupakan konsep yang akan diajukan untuk PKPT 2020 berbasis risiko sesungguhnya. PKPT 2020 berbasis risiko kemudian akan diimplementasikan setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektur II dan Inspektur Utama.

Gambar 11. PKPT 2020 Berbasis Risiko Inspektorat II

No.	Kegiatan Utama, Tindaklanjut, dan Kegiatan Pengawasan Lanjut	Auditor	Risiko Audit	PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (P.K.P.T.)													
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des		
A. ATURAT				1. Audit Keuangan Pemerintah Tahunan 2019 dan Penilaian Komitmen dan Hasil kerja Bagan Perencanaan dan Melaksanakan	1. Bagan Melalui Ceklist dan Laporan BIDA dan Perangkat Dinas pada pekerjaan Mitra Staf 2. Bagan Melalui Menyeleksi	Perangkat 1 pada pekerjaan Mitra Staf 1. Perangkat 2 pada pekerjaan Bagan Melalui Menyeleksi											
1	Audit Keuangan Pemerintah Tahunan 2019 dan Penilaian Komitmen dan Hasil kerja Bagan Perencanaan dan Melaksanakan																
2	Audit Keuangan Pemerintah Tahunan 2019 dan Penilaian Komitmen dan Hasil kerja Bagan Perencanaan dan Melaksanakan I			Audit melalui rapat teknis antar dinas dan mitra staf antara Bagan dan mitra staf penilaian Komitmen dan Hasil kerja Bagan	1. Bagan Selanjutnya Komisi VII 2. Bagan Selanjutnya	Perangkat 2 pada pekerjaan Komisi VII 2. Bagan Selanjutnya											
3	Audit Keuangan Pemerintah Tahunan 2019 dan Penilaian Komitmen dan Hasil kerja Bagan Perencanaan dan Melaksanakan II			10P. Daerah dikonsolidasi dan dipersiapkan	1. Bagan Selanjutnya pada Komisi VII 2. Bagan Selanjutnya pada Bidan	Perangkat 3 pada pekerjaan Komisi VII 2. Bagan Selanjutnya pada Bidan											
4	Audit Pengawas Bagan dan Komitmen dan Hasil kerja Bagan Perencanaan dan Melaksanakan					Perangkat 2 pada pekerjaan Bidan											
B. REVIEW																	
1	Risiko Layanan Kesejahteraan Sosial DPR RI Tahun 2019			Risiko Selain diketahui oleh Bidan (Auditolek)													
2	Kiriman BPK dan BAKI			Auditinspektor II yang yaik ALPIS													
C. EVALUASI																	
1	Evaluasi Komitmen TW IV 2019			Dewan Bidang Perencanaan dan EKDI													
2	Evaluasi Komitmen TW I 2020			Dewan Bidang Perencanaan dan EKDI													
3	Evaluasi Komitmen TW II 2020			Dewan Bidang Perencanaan dan EKDI													
4	Evaluasi Komitmen TW III 2020			Dewan Bidang Perencanaan dan EKDI													
5	Evaluasi Komitmen pengawasan anggaran Bidan dan BIR			Subdirektorat Kontrol Keuangan BPK RI													
D. PEMANTAUAN																	
1	Pemantauan Penilaian Total Lengkap Perangkat Inspektorat II Tahun 2019			1. Lengkapi Pengawasan Berkeliruan II													
2	Pemantauan Penilaian Zona dan Perangkat Bidan Pengawasan Ibu					Mandatori/ by request											
E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA																	
1	Konsultasi dan pertemuan terkait pelaksanaan Penilaian Perangkat melalui yg berlaku			Konsultasi Penilaian Skripsi Berdasarkan Konsistensi Kepatuhan Peraturan NIP. Audit dan Evaluasi dan Rencana RENSTRA 2020													

Sumber Kegiatan Inspektorat II = 17 sengaja

MONITORING

JAKARTA 29 SEPTEMBER 2019

INSPEKTUR II

b. Joko Mulyadi M.Si.
NIP. 1962111419920101

Dr. Syaiful Nugraha, M.Si.
NIP. 1962070119901101

Ferry Putri Syariah, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 198812271993022001

Dalam rangkaian proses penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis melaksanakan komunikasi yang efektif, dan efisien sesuai dengan nilai-nilai komitmen mutu serta menerapkan proses berpikir yang inovatif dan kreatif demi menunjang proses kegiatan pengawasan yang semakin efektif dan efisien kedepannya di area Inspektorat II. Di samping itu prinsip akuntabilitas dalam pemaparan data risiko yang ada di setiap area pengawasan Inspektorat II, akan menjadikan sebuah *Early Warning* atas kemungkinan terjadinya suatu *Fraud* atau kecurangan.

Kegiatan 4 : Melakukan review PKPT 2020 berbasis Risiko beserta kelengkapan pendukungnya oleh atasan langsung.

Dalam melakukan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko, penulis perlu melakukan konsultasi kepada atasan langsung yaitu Auditor Madya, demi penyempurnaan hasil penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko. Berdasarkan hasil review yang diberikan oleh Auditor Madya, diketahui bahwa dalam penyusunan PKPT 2020 akan memungkinkan adanya perubahan jadwal kegiatan, hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan mandatory yang berasal dari atasan oleh karena itu adanya kemungkinan revisi yang bersifat kondisional atas PKPT 2020 yang telah terkonsep sebelumnya. Konfirmasi lebih lanjut oleh Auditor Madya, perlu dilakukan monitoring atas perhitungan Angka Kredit yang bisa dimasukkan ke dalam komponen pendukung dalam PKPT 2020 berbasis risiko. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui nilai angka kredit yang harus dicapai untuk dapat melakukan peningkatan jabatan tepat pada waktunya.

Hasil review yang dilakukan atas PKPT berbasis risiko akan meningkatkan kualitas hasil audit dan rekomendasi audit sesuai dengan tingkatan risiko dan beban kerja yang dihadapi oleh unit kerja. Nilai-nilai yang dapat di aplikasikan dalam melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko yaitu

Akuntabel dalam melaksanakan prinsip keterbukaan, Profesional dalam meminta masukan dari para ahli terkait penyusunan PKPT berbasis risiko, dan Integritas yaitu memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan review PKPT berbasis risiko.

Gambar 12. Melakukan review PKPT 2020 berbasis risiko dengan Auditor Madya



Kegiatan 5 : Melaporkan hasil akhir kegiatan.

Pada tahap akhir ini, penulis memaparkan hasil dari aktualisasi atas rancangan aktualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan aktualisasi dilakukan pada masa habituasi selama jangka waktu 30 hari di lingkungan pekerjaan Inspektorat II, Inspektorat Utama dan lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Output akhir yang didapat setelah melalui 5 tahap kegiatan dipertanggungjawabkan di dalam kegiatan akhir ini. Pemaparan hasil aktualisasi dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 pada jam 1 siang, yang dihadiri oleh Ibu Inspektur II, dan seluruh Auditor di area Inspektorat II.

Gambar 13. Sosialisasi hasil akhir PKPT 2020 Berbasis Risiko



E. Stakeholder

Para Pejabat Fungsional Auditor ITTAMA, Pejabat Pelaksana TU ITTAMA, Auditor Inspektorat II Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta CPNS di lingkungan Inspektorat II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

F. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Beberapa kendala yang akan dihadapi penulis adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan akses informasi
2. APIP kekurangan personil yang memahami proses bisnis
3. APIP kekurangan personil yang memahami konsep penilaian maturitas manajemen risiko, identifikasi risiko dan analisisnya

Dalam menghadapi kendala tersebut, penulis memiliki beberapa strategi untuk mengatasi kendala tersebut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

2. Melakukan pemahaman terkait proses bisnis di awal penugasan audit sebelum melakukan prosedur audit
3. Melakukan *Transfer Knowledge* kepada teman sejawat terkait dengan manajemen risiko

G. Analisis Dampak

1. Hasil Inisiatif

Dampak Negatif :

Dampak dengan tidak adanya PKPT berbasis risiko adalah lemahnya pengendalian manajemen yaitu tidak dapat melakukan identifikasi risiko-risiko utama dalam unit kerja yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Selain itu juga menimbulkan adanya pemetaan ruang lingkup Audit yang tidak tepat sasaran. Perencanaan program kerja audit (PKPT) yang tidak didasari oleh sistem yang terstruktur akan berakibat terjadinya tumpang tindih penugasan audit yang kemudian akan mempengaruhi efektifitas dan efisien dalam penugasan audit

Dampak Positif :

Perencanaan pengawasan tahunan disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan telah mencakup area-area organisasi yang memiliki paparan risiko terbesar. Oleh karena itu dengan adanya PKPT 2020 berbasis risiko, akan memberikan nilai tambah terhadap perencanaan audit yang mana telah terdapat dasar yang jelas dalam pemetaan auditee, dan diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisien dalam penugasan audit.

2. Nilai Dasar ANEKA

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan

publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Sangat pentingnya nilai akuntabilitas karena di dalamnya terdapat nilai-nilai terkait pertanggung jawaban kinerja baik individu, kelompok, maupun organisasi, Mendahulukan kepentingan Publik, Partisipatif, dan Transparan. Jika dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi tidak adanya nilai Akuntabilitas maka kegiatan audit Inspektorat II tidak bersifat akuntabel, netral, dan transparan. Oleh karena itu dengan tidak adanya PKPT 2020 berbasis risiko akan menimbulkan adanya anggapan bahwa program kerja tidak dibuat secara akuntabel dan hanya bertujuan mencari-cari masalah karena tidak terdapat dasar penentuan yang tepat, yang mana dalam pembuatan PKPT sebelumnya pada Inspektorat II tidak terdapat dasar yang terdokumentasikan secara jelas dan transparan sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya dalam penentuan auditi pada pemetaan program kerja audit tahunan (PKPT).

b. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Rela Berkorban, Kepentingan Bersama, dan Musyawarah.

Dalam kegiatan organisasi sikap nasionalis sangat diperlukan, seperti dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu organisasi pengambilan keputusan harus berdasarkan

kepentingan bersama yaitu kepentingan publik atau masyarakat untuk dapat mencapai satu tujuan.

Jika dalam melaksanakan Aktualisasi tidak adanya nilai Nasionalisme maka rancangan aktualisasi terkait Evaluasi kegiatan audit Inspektorat II berupa penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko tidak akan didapatkan kesepakatan untuk melaksanakan program tersebut karena tidak mendahulukan kepentingan bersama, sehingga tidak didapatkannya keputusan pelaksanaan program dan masukan-masukan yang membangun terkait penyusunan PKPT 2020 area Inspektorat II.

c. Etika Publik

Etika Publik erat kaitannya dengan nilai-nilai Jujur, cermat, Disiplin, Hormat, Sopan Santun dalam bersikap dan bertindak. Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko sangat diperlukan nilai-nilai etika public, terutama dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, misalnya dalam melakukan permohonan data dan komunikasi atas pelaksanaan aktualisasi tersebut. Apabila tidak menerapkan nilai-nilai Etika Publik tersebut maka akan berdampak tidak terealisasinya kegiatan aktualisasi tersebut dikarenakan kurangnya menerapkan nilai sopan santun dan rasa hormat, sehingga auditee pun enggan untuk memberikan data.

d. Komitmen Mutu

Komitmen Mutu adalah bagaimana pelayanan seorang ASN harus berorientasi pada hasil dan memiliki mutu yang bagus, dan erat kaitannya dengan efisien efektifitas serta Innovasi,

Jika dalam suatu kegiatan audit di Inspektorat tidak melakukan peningkatan program kerja dan tidak melakukan inovasi yang diperlukan maka kualitas pemeriksaan dan audit pada Inpektorat berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP masih berada di level 2 dan tidak akan menuju ke level 3. Apabila PKPT 2020 berbasis risiko tidak diterapkan maka kualitas dan kinerja Inspektorat Setjen dan BK DPR RI akan tertinggal dengan Inspektorat di Lembaga atau Instansi lainnya.

e. Anti Korupsi

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Selain itu Inspektorat berfungsi sebagai kontrol untuk meminimalisir risiko-risiko praktik korupsi yang terjadi di Sekjen dan BK DPR RI. Namun apabila Inspektorat belum memiliki PKPT Berbasis Risiko sebagai dasar dari program audit yang akan dilaksanakan maka kegiatan audit dan pengawasan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga risiko adanya praktik korupsi tidak dapat terdeteksi dengan tepat.

H. Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan	Agustus 2019		September 2019		Oktober 2019	
	Week		Week		Week	
	4	1	2	3	4	1
Rapat dengan jajaran Internal Inspektorat II			1			
Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan PKPT 2020 berbasis risiko			2	3		
Membuat PKPT berbasis Risiko beserta dokumen pendukungnya			4			
Melakukan review atas PKPT berbasis Risiko beserta kelengkapan pendukungnya yang dilakukan oleh atasan langsung				1		
Melaporkan hasil akhir kegiatan					2	3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Auditor Intern Pemerintah adalah pejabat pada lingkungan pemerintah baik pusat ataupun daerah yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundangan.

Auditor Intern Pemerintah memiliki tugas utama melakukan audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan. Semua jenis pelaksanaan tugas ini memiliki tungs yang secara garis umum sama, yaitu memberikan keyakinan kepada pimpinan kementrial/Lembaga bahwa tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah telah berjalan secara efektif. Efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan pengawasan yang optimal, pelaksanaan penugasan harus berfokus pada identifikasi risiko, penilaian risiko, termasuk penilaian atas mitigasi risiko yang telah dijalankan. Untuk dapat melaksanakan penugasan ini, diperlukan suatu perencanaan audit tahunan berbasis risiko (*risk based audit plan*). Penentuan prioritas kegiatan audit intern harus didasarkan pada evaluasi/penilaian risiko, dan seluruh APIP harus menyusun perencanaan audit tahunannya dengan berbasis risiko.

Tujuan dan manfaat Perencanaan audit tahunan berbasis risiko adalah untuk:

- a. Membantu unit audit intern focus pada hal-hal yang signifikan dan berdampak luas seperti identifikasi risiko-risiko utama dalam organisasi yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan
- b. Membantu pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif
- c. Mengidentifikasi risiko-risiko utama semua proses bisnis.

Hasil proses Perencanaan Audit Intern Tahunan adalah daftar *Auditable Units* terpilih, disusun dalam berdasarkan urutan signifikansi atau prioritasnya, yang memerlukan asuransi dan penyempurnaan atas sistem manajemennya. Dengan menetapkan urutan klien berdasarkan prioritasnya, penugasan diharapkan akan menghasilkan usulan perbaikan, memberikan nilai tambah yang optimal dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi. Dengan demikian, aktivitas audit akan lebih mampu memberikan keyakinan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan klien akan dapat tercapai.

B. Saran

PKPT Berbasis Resiko disusun untuk menyiapkan Inspektorat menuju level 3. Resiko merupakan hambatan-hambatan yang bisa mengurangi atau menghambat tujuan. Orientasi Inspektorat sudah melihat ke depan sehingga perencanaan PKPT harus berbasiskan Resiko. Resiko dapat berdampak terhadap organisasi Inspektorat perlu menemukan cara-cara baru untuk melakukan tugas dan fungsinya. Auditor diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap organisasi yang diperiksanya. Resiko berasal dari eksternal dan internal. APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi serta memperhatikan Renstra. PKPT berbasis resiko diawali

dengan menyusun Peta Audit (Audit Universe) yang terdapat pada wilayah kerja Inspektorat. Penentuan risiko bisa dilihat dari berbagai pendekatan seperti besarnya anggaran, tahun terakhir dilakukannya audit, perubahan manajemen, analisis beban kerja dan lain-lain. Esensi penyusunan PKPT berbasis resiko inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pemeriksa untuk melakukan audit.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Kepada Pak Irtama



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN NOMOR : IP/229/VIM/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT. Impaktur II, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertemu dengan Pak Irtama

Nama : Ellyson Lestari, S.E.
NIP : 1992040720030202
Jabatan : Asisten Ahli Pertama
Unit Kerja : Impaktur II
Materi : Marzukhi Susanti, S.E.

Adalah surat CPNS Kelompok B1 Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang akan melaksanakan kegiatan Akreditasi ini tanggal 25 Agustus 2019 – 5 Oktober 2019.

Alasan kegiatan Akreditasi yang dilakukan adalah melaksanakan Penyusunan Program Kewajiban Penelitian (PKPT) 2020 Berbasis Risiko Pada Area Inovatif II.

Diketahui surat ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penulis ber誓う (swear).

Jakarta, 29 Agustus 2019.

PT. Impaktur II

Ellyson Lestari, S.E.
NIP. 1992040720030202

Drs. Setiyo Teguhno, S.M.
NIP. 19620707196207

2. Surat Undangan Rapat Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko



Nomor : IP/229/HII/2019
Tgl : Rabu
Desain : Siger
Materi : Undangan

Dr. Agustina, SE

- Tujuan :
1. Inovasi
2. Inovasi Negara TII Implementasi Uraian
3. Para Keadilan TV Implementasi Uraian
4. Pengembangan
5. IPB Implementasi Uraian
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Surabaya

Dengan ini kami mengundang seluruh karyawan pada pertemuan
yang akan dilaksanakan pada:

Martapura : Senin, 2 September 2019
Pukul : 10.00 WIB
Aula : Ruang Komisi I Penyusunan PKPT Tahun 2020 Berbasis
Risiko
Tempat : Ruang Rapat Implementasi II

Bisa perbaiki (tanpa ketik dalam) Sesudahnya, kami sangat bersyukur.

PT. Impaktur II



LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Kepada Pak Irtama



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN NOMOR : IP/229/VIS/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT Insipirasi II Secretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menegaskan bahwa:

Nama: Fitriyani Ledan, S.E.
NIP: 19620107201003002
Jabatan: Asisten Ahli Perdana
Unit Kerja: Inspektorat II
Materi: Manajemen Sosial, S.E.

Adalah Lyrus CPNS Seluruhnya di Secretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang melaksanakan kegiatan Absensi mulai tanggal 25 Agustus 2019 - 8 Oktober 2019. Alasan kegiatan Absensi yang dilakukan adalah melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Berbasis Risiko pada Area Inspektorat II.

Dengan surat ini diatas agar dapat dipergunakan dengan setia dan teliti dan percaya

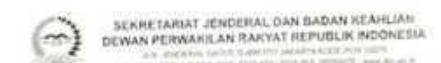
Jakarta, 23 Agustus 2019

PT. Insipirasi II

Astria Pratiwi

Drs. Sigitarto, MM
NIP. 19600711198101

2. Surat Undangan Rapat Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko



Nomor : IP/129/RS/2019
SMT : Rabu
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Undangan

28 Agustus 2019

1. Inspektorat II
2. Komisi Pangan TG Inspektorat Utama
3. Para Kepala TG X Inspektorat Utama
4. Kepala Inspektorat II
5. IPD Inspektorat Utama
Secretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Bakrie

Dengan ini kami mengundang Ataudina Saadira pada pertemuan
yang akan dilaksanakan pada

Martinggap : Senin, 2 September 2019
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Kepala Klasterisasi Penyusunan PKPT Tahun 2020 Berbasis
Risiko
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Bisa perbaikan dan kualitasnya. Salam sejahtera.

PT. Insipirasi II

Drs. Sigitarto, MM
NIP. 19600711198101

3. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko



4. Laporan Singkat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko



5. Pengetahuan-pengetahuan awal yang masih mampu dikenali dengan baik dan berkenaan dengan temuan mereka yang disampaikan oleh seorang TV, merupakan faktor penentuan pengetahuan. Pengaruh temuan televisi TV ini untuk pengetahuan diri

Deze oefeningen kunnen niet gevonden worden in hoofdstuk 5.

• Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen dan dependen, dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi.

• Etwas später kommt der Vier- und Fünfzähler.

1. Professional PR-IT. 2020 Версия Релиз 3. Помимо в Web-версии пакета

reduce public health resources, conversion to personal health using health informatics should be considered.

Please check your email for an invite.

www.jbmri.org

Table 3. Summary of results.

Dr. George Miller, M.D.

5. Foto Rapat Koordinasi Internal Penyusunan PKPT 2020 Berbasis Risiko



6. Nota Dinas atau Surat Permohonan Permintaan Data

BEM KONSEPTEKNIK
KONSEPTEKNIK
SEKRETARIAT JERDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
JL. DIPONEGORO 100 SURABAYA 60111 TEL. 031-3210000 FAX. 031-3214000 E-MAIL. konsen@konsen.go.id

7. Dokumentasi Proses Permintaan Data Kepada TU ITTAMA dan Bagian Perencanaan dan Keuangan



8. Dokumentasi Permintaan Data melalui Email dengan Bagian Keuangan

The screenshot shows an email inbox with several messages. The top message is from 'Fitriyani testari' to 'Dedy Bagus Prakasa' with the subject 'Permintaan data anggaran pengadaan barang dan jasa'. The message body contains a request for budgetary data for procurement items and services for the year 2019. Below this is another message from 'Dedy Bagus Prakasa' to 'Fitriyani testari' dated 10/10/2019, expressing thanks for the screenshot and stating that the data is available. The message concludes with a signature and a note about the screenshot being used for reporting purposes.

Permintaan data anggaran pengadaan barang dan jasa Kirim Masuk

Fitriyani testari 09-09-19 17:48 (7 jam yang lalu) ...

Dear Pak Dedi Berdasarkan dokumenbelumnya berkat data Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada aplikasi SIRUP pada tahun 2019 untuk wilayah Inspektorat

Dedy Bagus Prakasa 10-10-19 09:41 (6 jam yang lalu) ...

Dear Fitri

Data yang sudah di screenshot tersebut sudah sesuai dan tentu untuk umum sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan

Terima kasih

Harap kembali,
Dedy Bagus Prakasa

Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

9. Dokumentasi Output Berupa PKPT 2020 Berbasis Risiko

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (P.K.P.T.) INSPEKTORAT II SIKKET MATAJU JENDERAL BPF RI TAHUN ANGGARAN 2020															
No.	Kegiatan Proses, Timbulahan dan Kegiatan Pengawasan Tahunan	Auditor	Risiko Audit	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
A. AKTIVITAS															
1. Audit Internal	• Audit Internal Organisasi Pengawas Tahunan P.K.P.T. Inspektorat II Sikket Mataju Jenderal BPF RI		1. Objektif Umum dan Spesifik 2. Objektif Pengawas	Pengawas 1 pada periode Maret (R1) dan Februari (R2) pada awal Periode Bulan Februari											
2. Audit Pengawasan Daerah Tingkat I Tahun 2019	• Audit Pengawasan Daerah Tingkat I Tahun 2019		Menentukan objek audit dengan berdasarkan kebutuhan riset dan kebutuhan evaluasi	Pengawas 1 pada periode Maret (R1)											
3. Audit Kelembagaan Pengawas Tingkat II Tahun 2019	• Audit Kelembagaan Pengawas Tingkat II Tahun 2019		Pengawas 1 pada periode Februari (R2)	Pengawas 1 pada periode Maret (R1)											
4. Audit Pengawasan Daerah Tingkat II Tahun 2019	• Audit Pengawasan Daerah Tingkat II Tahun 2019			Pengawas 2 pada awal Periode (R2)											
B. KEGIATAN															
1. Kegiatan Audit Selama Tahun 2019	• Kegiatan Audit Selama Tahun 2019	Lembaga Pengawas Tingkat Daerah (LPTD)													
2. Kegiatan Audit Selama Tahun 2020	• Kegiatan Audit Selama Tahun 2020	Kegiatan Audit Selama Tahun 2020													
C. KEGIATAN LAINNYA															
1. PEMANTAUAN	• Penilaian Kinerja Tidak Langsung Pengawas Tingkat Tinggi Tahun 2019	A. Laporan Pengawasan Departemen II													
2. Kegiatan Pengawasan Tingkat Tinggi Pengawasan Tingkat Tinggi	• Kegiatan Pengawasan Tingkat Tinggi Pengawasan Tingkat Tinggi	Hasil Kegiatan Pengawasan Tingkat Tinggi													
E. KEGIATAN PENGETAHUAN LAINNYA	• Kegiatan pengetahuan lainnya Pengawasan Tingkat Tinggi		Kegiatan Pengetahuan Tingkat Tinggi Pengawasan Tingkat Tinggi Selain Pengawasan Tingkat Tinggi												

10. Dokumentasi Kegiatan dengan Mentor dan Diskusi dengan Auditor Inspektorat II



11. Kegiatan Reviu PKPT 2020 Berbasis Risiko oleh Atasan Langsung



12. Kegiatan Sosialisasi Hasil Final PKPT 2020 Berbasis Risiko dan Laporan singkat



LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN AKTUALISASI CPNS DI
INSPEKTORAT II

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019
Waktu : 13.00 WIB – 15.00 WIB
Acara : Rapat koordinasi membaas Kegiatan Pengawasan dan Kegiatan Aktualisasi CPNS di Inspektorat II
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II, Lantai 5
Ketua Rapat : Furqony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
Peserta Rapat : Para Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat II

I. Pendahuluan

1. Rapat dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Inspektor II, Furqony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
2. Rapat koordinasi diawali dengan perkenalan di Inspektorat II
3. Rapat yang membahas kegiatan Pengawasan yang akan dilaksanakan di Bulan Oktober s.d. Desember 2019 dan Kegiatan Aktualisasi CPNS di Inspektorat II.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Kegiatan dan/atau mengenai agenda kegiatan yang akan dilakukan di Inspektorat II mulai dari Bulan Oktober s.d Desember 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:
 - a. Pelaksanaan penyusunan RKPT Inspektorat II Tahun 2020
 - b. Rencana melaksanakan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Tanggal 23 Oktober s.d 26 November 2019
 - c. Rencana melaksanakan Evaluasi Realisasi Anggaran TW III TA 2019 pada Tanggal 7 s.d. 18 Oktober 2019
 - d. Rencana melaksanakan Pemantauan TLUHP Inspektorat II pada Tanggal 2 s.d. 12 Desember 2019.

13. Surat undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi Hasil Final Aktualisasi



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN JENDERAL SADIK SUBHARJO JAKARTA PUS. POLO
TELP. (021) 5713 340 FAX. (021) 5713 4237 5713 350 WEBSITE: www.sj.go.id

Nomor : 02004/2019
Dit : Buku
Dinas : Segera
Perihal : Undangan

7 Oktober 2019

1. Inspektor II
2. Ketua Digeru TP Inspektorat II
3. Para Kepala TGU Inspektorat II
4. Auditor Inspektorat II
5. JPU Inspektorat II
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Surabaya

Dengan ini kami mengundang seluruh Bapak/Ibu yang akan
dilaksanakan pada :

Tujuan : Senin, 7 Oktober 2019
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Koordinasi & Pembinaan Kegiatan CPNS Inspektorat II
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Kita bertemu dan bertemu bersama-sama untuk menyampaikan

Inspektor
Furqony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 1988-02-25-1993-2-201



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN JENDERAL SADIK SUBHARJO JAKARTA PUS. POLO
TELP. (021) 5713 340 FAX. (021) 5713 4237 5713 350 WEBSITE: www.sj.go.id

perihal : Undangan

Perihal : Rapat Koordinasi & Pembinaan Kegiatan CPNS Inspektorat II

No.	JABATAN	AKTIVITAS	TANGGAL DAN WAKTU
1.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
2.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
3.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
4.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
5.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
6.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
7.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
8.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
9.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
10.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
11.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
12.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
13.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
14.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
15.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
16.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
17.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
18.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
19.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
20.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
21.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
22.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
23.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
24.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
25.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
26.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
27.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
28.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
29.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
30.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
31.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
32.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
33.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
34.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
35.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
36.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
37.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
38.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
39.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
40.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
41.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
42.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
43.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
44.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
45.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
46.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
47.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
48.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
49.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
50.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
51.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
52.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
53.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
54.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
55.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
56.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
57.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
58.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
59.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
60.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
61.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
62.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
63.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
64.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
65.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
66.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
67.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
68.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
69.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
70.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
71.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
72.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
73.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
74.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
75.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
76.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
77.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
78.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
79.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
80.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
81.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
82.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
83.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
84.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
85.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
86.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
87.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
88.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
89.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
90.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
91.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
92.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
93.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
94.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
95.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
96.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
97.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
98.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
99.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
100.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
101.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
102.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
103.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
104.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
105.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
106.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
107.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
108.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
109.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
110.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
111.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
112.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
113.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
114.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
115.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
116.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
117.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
118.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
119.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
120.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
121.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
122.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
123.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
124.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
125.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
126.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
127.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
128.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
129.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
130.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
131.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
132.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
133.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
134.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
135.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
136.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
137.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
138.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
139.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
140.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
141.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
142.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
143.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
144.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
145.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
146.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
147.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
148.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
149.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
150.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
151.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
152.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
153.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
154.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
155.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
156.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
157.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
158.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
159.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
160.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
161.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
162.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
163.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
164.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
165.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
166.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
167.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
168.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
169.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
170.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
171.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
172.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
173.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
174.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
175.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
176.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
177.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
178.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
179.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
180.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
181.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
182.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
183.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
184.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
185.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
186.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
187.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
188.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
189.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
190.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
191.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
192.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
193.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
194.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
195.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
196.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
197.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
198.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
199.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
200.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
201.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
202.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
203.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
204.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
205.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
206.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
207.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
208.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
209.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
210.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
211.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
212.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
213.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
214.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
215.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
216.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
217.	Para Kepala TGU	MEETING	07/10/2019
218.	Para Kepala TGU	MEETING	0

14. Kegiatan Coaching



15. Dokumentasi Kartu Kendali Bimbingan

SECRETARIAAT JENDERAL DAN KABINET KAWALAN
DESEN PENGAWASAN KAYU DI REPUBLIK INDONESIA

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2010

No.	Nama Peserta	Tanggal Pembimbingan	No. Peserta	Nama Coach	Tujuan	Ruangguru	Tujuan
1	Dr. Agus, S.Pd	2010-07-10	2010-07-10	Sugeng - Rudi	Untuk review		73
2							74
3							75
4							76
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	(Ong)						

(*) Perbaikkan yang ada
sebut perbaikan yang
dilakukan dan tanda

Angsur Bimbingan Pembinaan
(Puncak Sulur) surat ke 04/2010-B

Bantuan, Surabaya

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2019**

Name Instansi NIP	Eko Sugiharto Kepala Sekolah NIP: 19690203 201102 1001	Name Coach Name NIP	Eko Sugiharto - 19690203 201102 1001		
No.	Peserta Pembimbingan	No Pembimbingan Peserta	Mata Pembimbingan	Ketercapaian Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
1	U. S. Sugiharto	1001	Tata Kelola	✓	
2	Eko Sugiharto	1002	Tata Kelola	✓	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dkt.				

(*) Pembimbingan yang selain pembimbingan yang dilaksanakan oleh Coach

Kepala Bidang Pembelajaran
Pendidikan Sekolah dan BH DPKR RI

Rusman, SH, MM

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2019**

Name Instansi NIP	Eko Sugiharto Kepala Sekolah NIP: 19690203 201102 1001	Name Mentor Name NIP	Haryono Heru Sutomo - 19640101 201102 1001		
No.	Peserta Pembimbingan	No Pembimbingan Peserta	Mata Pembimbingan	Ketercapaian Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
1	U. S. Sugiharto	1001	Tata Kelola	✓	
2	Eko Sugiharto	1002	Tata Kelola	✓	
3	Eko Sugiharto	1003	Tata Kelola	✓	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dkt.				

(*) Pembimbingan yang selain pembimbingan yang dilaksanakan oleh Mentor

16. Dokumentasi Data Anggaran

4152020

Perencanaan DPP RI

JUMLAH PER BIRO - DIPA TAHUN ANGGARAN 2019 UNIT DEWAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Jumlah
59	BIRO KESKRETARIATAN PIMPINAN	165.179.724.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	83.366.242.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	464.515.641.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	138.383.453.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNTANG-UNTANG	7.933.929.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	2.811.234.802.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	84.562.500.000
	Total	3.693.176.491.000

Hak Cipta © 2011
Biro Data dan Teknologi Informasi (BDTI) - Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) - Sekretariat
Jenderal DPP RI

- Tambahan Filter
- Filter petunjuk Per cont / nice/pain ketanya ilangin
- Tabel Latihan ref rule
- ABK konsep)
- Statistik Rhaningka statistik paha rule ->

**JUMLAH PER BIRO - DIPA
TAHUN ANGGARAN 2019
KEGIATAN**

Tanggal Cetak: 16-08-2019

KODE	DESKRIPSI KEGIATAN	JUMLAH
59	BIRO KE SEKRETARIAT PAPAN	8.000.537.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	4.904.529.000
93	BIRO UMUM	237.245.525.000
123	INSPEKTORAT I	3.511.967.000
124	INSPEKTORAT II	3.960.541.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	7.587.782.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	2.442.861.000
128	BIRO PEMERINTAHAN PARLEMEN	189.952.862.000
129	PUSAT PENDIDIKAN DRN PELATIHAN	23.629.081.000
133	PUSAT DATA DAN INFORMASI	29.612.423.000
138	PUSAT PERANCANGAN LINMAS/LINMAS	17.802.702.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKUAN UUPA	4.852.057.000
140	PUSAT KAJIAN ANGGARAN	5.258.830.000
141	PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	9.935.333.000
143	BIRO PROTOKOL	10.748.958.000
146	BIRO HUKUM DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT	3.422.200.000
147	BIRO KEPERGAWAIAN DAN ORGANISASI	36.238.775.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	293.625.184.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	1.185.237.245.000
163	PUSAT R&D INOVASI	14.026.277.000

17. Dokumentasi Data TLHP

**REKAPITULASI RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Lampiran Surat Keputusan Nomor: 17 /S/XVII/1/2019

No	Lapwes Hasil Pemeriksaan	Jumlah Terwujud	Jumlah Belum terwujud	Status Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TDD
1	Proyek Pembangunan Fasilitas Projek Sosial Kemanusiaan dan Grika Sabha DPR TA 2003 & 2004	17	19	10	9	-	-
2	Pengeluaran dan Peranggungjawaban Anggaran Belanja Bantuan dan Bantuan Modal Yang Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kehibungan TA 2007 dan 2008	11	19	17	2	-	-
3	Laporan Keuangan TA 2008	8	9	8	1	-	-
4	Laporan Keuangan TA 2010	8	14	10	4	-	-
5	Pengeluaran Peranggungjawaban Kta Tahun 2009 & 2010	13	16	9	7	-	-
6	Laporan Keuangan TA 2011	20	38	26	11	-	-
7	Pengeluaran Peranggungjawaban Anggaran Belanja Negara Tahun 2011 & 2012	12	23	14	9	-	-
8	Laporan Keuangan TA 2012	14	25	15	8	-	-
9	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atau Efektivitas Kegiatan Audit dan Kerja LX oleh Aparat Pengawasan Internal Perseorangan (APIP) pada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta	12	21	-	-	21	-
10	Laporan Keuangan TA 2013	16	40	27	13	-	-
11	Laporan Keuangan TA 2014	14	34	26	8	-	-
12	Laporan Keuangan TA 2015	15	43	25	12	8	-
13	Laporan Keuangan TA 2016	8	18	3	11	4	-
14	Laporan Keuangan TA 2017	8	16	10	3	1	-
Jumlah Pemantauan TLHP		175	336	201	99	36	-

Keterangan:

- S: Sesuai Rekomendasi
- BS: Belum Sesuai
- BD: Belum Ditindaklanjuti
- TDD: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

18. Dokumentasi Data Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Aplikasi SIRUP

